



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUHAMMAD FAUZAN**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **858113**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.879.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/106 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 595.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 695 m2/695 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 633 m2/633 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/327 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/167 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 626 m2/626 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2450 m2/2450 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 243.700.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000



4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.  
1.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.950.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.723.365

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.160.373.365

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.160.373.365

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.